

## DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta; Kementrian Kesehatan. 2009
2. Dewi MW, Sulistyani D. Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta Bpjs Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta. Jurnal Akuntansi Dan Pajak. 2015;16(01):33–47.
3. Adiningsih MH. Analisis Perbandingan Biaya Pelayanan Rawat Inap dengan Metode ABC, Tarif Perpup dan Paket Pelyanan BPJS Pada Puskesmas Gemarang Kabupaten Madiun. Jurnal Ekonomi. 2017
4. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta; Kementrian Kesehatan. 2014
5. Darmawan IR, Thabrany H. Refleksi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pelayanan Kedokteran Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Tangerang Tahun 2017. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2017;06:174–83.
6. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Jakarta; Kementrian Kesehatan. 2016
7. Fitriani A, Helmy A. Analis Unit Cost Puskesmas di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Studi pada Puskesmas Kedung kandang Kota Malang. Jurnal

Ekonomi. 2017

8. Republik Indonesia. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Jakarta; BPJS Kesehatan. 2015
9. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Jakarta; Kementrian Kesehatan. 2014
10. Widaningtyas E. Kesiapan Tata Kelola Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*. 2018;6(1).
11. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta; Kementrian Dalam Negeri. 2018
12. Subirman. Perhitungan Biaya Satuan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Di Kota Samarinda Tahun 2012 ( Studi Kasus Puskesmas Palaran ). *Jurnal Ilmu Kesehat Masyarakat*. 2013;4:166–73.
13. Trisnantoro L. Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen Rumah Sakit. Yogyakarta: Gaja Mada University Press; 2005.
14. Diana L. Analisis Perhitungan Tarif Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Unit Cost (Studi Kasus Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung) [Online]. Padang; 2017. Dari: <http://scholar.unand.ac.id/27390/> [Desember 2023]
15. Kaunang B, Walandouw SK. Penerapan Metode Activity Based Costing System Dalam Menentukan Besarnya Tarif Jasa Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Bethesda Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen*,

- Bisnis dan Akunt. 2015;3(1):1214–21.
16. Puskesmas lapai. Profil Puskesmas Lapai Tahun 2020. Padang; Puskesmas Lapai. 2020.
  17. Horngren. Akuntansi Biaya. Jilid 1. Jakarta: Erlangga; 2008.
  18. Mulyadi. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat; 2012.
  19. Dewi SP, Kristanto SB. Akuntansi Biaya. Edisi 2. Bogor: In Media; 2015
  20. Petrus Tandi B. Analisis Biaya Satuan (Unit Cost) Pada Pelayanan Kesehatan Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*. 2018;5(5):134–44.
  21. Riwayadi. Akuntansi Biaya: Pendekatan Tradisional dan Kontemporer. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat; 2017.
  22. Bustami B, Nurlela. Akuntansi Biaya. Edisi kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media; 2010.
  23. Agastya dan Arifai. Unit Cost dan Tarif Rumah Sakit. Universitas Gajah Mada; 2009.
  24. Kula JI. Metode Penetapan Biaya Rawat Inap Pada BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. 2013;
  25. Rudianto. Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Startegis. Jakrta: Erlangga; 2013.
  26. Nurmalasari D. Activity-Based Costing System Sebagai Alternatif Penentuan Harga Pokok Tarif Jasa rawat Inap Pada Puskesmas Wanasaba Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi*. 2019
  27. Kurniawan H, Widyawati D. Activity Based Costing dalam Penentuan Tarif Rawat Inap Rumah Sakit Umum. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 2013
  28. Harsetyanto TOP. Formulasi Unit Cost Layanan Kesehatan Puskesmas Dalam

- Rangka Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (Studi Kasus Pada Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi). Jurnal Ilmu Mhasiswa FEB. 2015;(1).
29. Indrianingrum I, Woro O, Handayani K. Input Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara STIKES Muhammadiyah Kudus ,Abstrak. 2017;2(2):140–7.
  30. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014. Jakarta; Kementrian Kesehatan. 2014
  31. Puskesmas lapai. Profil Puskesmas Lapai Tahun 2021. Padang; Puskesmas Lapai. 2021.
  32. Puskesmas lapai. Laporan Tahunan Puskesmas Lapai Tahun 2020. Padang; Puskesmas Lapai. 2020.
  33. Wahyuni, S. Analisis Unit Cost Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas Talang Babungo Tahun 2016. [Skripsi]. Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas; 2016
  34. Ridwan MM. Evaluasi Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas Non Rawat Inap di Puskesmas Ciptomulyo Kota Malang. [Skripsi]. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; 2015
  35. Didik B, Turniati Laksmiarti. Perhitungan Biaya Rawat Jalan Berbasis Kinerja di Puskesmas Gedangan dan Puskesmas Candi Kabupaten Sidoarjo (Kajian Isu Publik dalam Formulasi Kebijakan Kesehatan). Buletin Penelitian

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta; Kementrian Kesehatan. 2009
2. Dewi MW, Sulistyani D. Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta Bpjs Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. 2015;16(01):33–47.
3. Adiningsih MH. Analisis Perbandingan Biaya Pelayanan Rawat Inap dengan Metode ABC, Tarif Perbup dan Paket Pelyanan BPJS Pada Puskesmas Gemarang Kabupaten Madiun. *Jurnal Ekonomi*. 2017
4. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta; Kementrian Kesehatan. 2014
5. Darmawan IR, Thabrany H. Refleksi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pelayanan Kedokteran Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Tangerang Tahun 2017. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. 2017;06:174–83.
6. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Jakarta; Kementrian Kesehatan. 2016
7. Fitriani A, Helmy A. Analis Unit Cost Puskesmas di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Studi pada Puskesmas Kedung kandang Kota Malang. *Jurnal*

Sistem Kesehatan. Oktober 2009;12(4):341-50.



